

PENGEMBANGAN INDUSTRI PARIWISATA DAN ISU KETENAGAKERJAAN: STUDI KASUS DI YOGYAKARTA

*Dra. Laila Nagib, M.A., APU**

1. PENDAHULUAN

Makalah ini bermaksud untuk menganalisis isu ketenagakerjaan berkaitan dengan pengembangan industri pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam menghadapi peluang dan kendala internal maupun eksternal. Penekanan tulisan pada isu ketenagakerjaan terutama berkaitan dengan penciptaan kesempatan kerja dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) sehubungan dengan kegiatan pariwisata di daerah tersebut. Informasi yang menjadi dasar tulisan diperoleh dari hasil penelitian lapangan yang dilakukan oleh tim peneliti PPK-LIPI di beberapa daerah pariwisata pada tahun 2002, yang antara lain dilakukan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Industri pariwisata sebagai bagian dari kegiatan ekonomi sektoral, potensial menjadi sektor strategis dalam pembangunan wilayah, sehingga diharapkan berperan penting dalam mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi di wilayah tersebut. Kegiatan pariwisata di suatu wilayah biasanya bergerak cepat dan dinamis serta memiliki efek ganda (*multiplier effect*) terhadap perkembangan berbagai sektor lainnya. Dengan demikian, selain potensial dalam memberi sumbangan untuk pertumbuhan ekonomi, diharapkan juga dapat mendorong penciptaan lapangan pekerjaan di berbagai sektor perekonomian. Kegiatan pariwisata juga membutuhkan profesionalisme untuk menaikkan daya saing produk sehingga

dibutuhkan SDM dengan berbagai kualifikasi pendidikan atau keterampilan sesuai dengan bidang kegiatannya. Hal ini dapat mendorong peningkatan kualitas SDM sejalan dengan kebutuhan perkembangan pariwisata.

Di sisi lain pengembangan pariwisata juga sangat rentan dan rapuh terhadap berbagai isu dan kejadian, baik bidang keamanan, kesehatan, maupun lingkungan hidup. Dampak pertumbuhan ekonomi terhadap penciptaan lapangan kerja juga masih sering diperdebatkan para ahli karena paradigma pembangunan yang mengutamakan pertumbuhan ekonomi, sering kali potensial menimbulkan dominasi elit dan ketimpangan dalam distribusi kekayaan (Abdullah dkk., 2002). Berbagai kajian tentang pariwisata di negara berkembang menunjukkan, banyak devisa yang justru kembali ke negara maju melalui berbagai pemilikan jaringan perusahaan yang berskala internasional, terutama dalam bidang akomodasi dan transportasi seperti hotel, transportasi, dan restoran. Dari perspektif sosial, kegiatan pariwisata juga potensial menimbulkan berbagai permasalahan di kalangan rakyat yang kurang beruntung seperti penggusuran tempat tinggal, eksploitasi seks, perjudian dan penyimpangan sosial lainnya yang bertentangan dengan norma, agama, dan nilai budaya setempat (Sugiantoro, 2000).

Dalam era globalisasi, yang batas daerah/negara makin tidak relevan, maka industri pariwisata dapat berdampak positif,

* Penulis adalah staf peneliti di Pusat Penelitian Penduduk (PPK-LIPI). Paper ini merupakan ringkasan dari tulisan yang menjadi bagian dari buku *Pengembangan SDM dan Pariwisata di Yogyakarta: Peluang dan Tantangan Otonomi Daerah dan Globalisasi*, PPK-LIPI dan S.H., 2002

sekaligus menimbulkan permasalahan bagi perkembangan sosial ekonomi suatu wilayah. Berdampak positif terutama dalam memperluas peluang pasar baik domestik maupun internasional, yang berarti potensial memperluas kesempatan kerja di lokasi tujuan wisata dan sekitarnya. Namun demikian, globalisasi juga sarat dengan persaingan yang tidak seimbang, sehingga menjadi tantangan bagi dunia pariwisata Indonesia, untuk serius meningkatkan daya saing produk sesuai dengan kebutuhan pasar domestik maupun global. Mampukah daerah yang bersangkutan menyediakan SDM yang berkualitas di bidangnya, sehingga dapat memenuhi kebutuhan pasar kerja?

Era otonomi daerah memungkinkan daerah memilih sektor yang menjadi andalan, sesuai dengan potensi yang dimiliki dan kebutuhan masyarakatnya. Jika pariwisata menjadi pilihan sektor andalan dalam pembangunan suatu wilayah, maka wilayah tersebut harus memiliki berbagai keunikan karakteristik untuk pengembangan perekonomian, sekaligus mampu memberdayakan masyarakat luas, baik sebagai pelaku maupun penikmat dari pengembangan industri tersebut. Peningkatan kemampuan masyarakat dalam berbagai usaha berkaitan dengan industri pariwisata, diharapkan mampu meningkatkan daya saing produk sesuai dengan permintaan pasar.

Yogyakarta merupakan salah satu tujuan wisata sesudah Bali dan Jakarta, dan memiliki citra yang cukup tinggi sesudah Bali. DIY juga memiliki potensi budaya dan nilai historis yang layak dikemas untuk menopang perkembangan industri pariwisata. Selama ini DIY dikenal relatif miskin sumber daya alam (SDA), namun kaya di bidang budaya dan memiliki SDM dengan berbagai kualifikasi pendidikan dan keterampilan. Dengan demikian, untuk pengembangan industri pariwisata DIY juga menghadapi berbagai peluang dan tantangan yang tidak kecil. Peluang penting yang dimiliki DIY dan daerah lainnya adalah diefektifkannya otonomi daerah (OTDA) melalui UU No. 22 dan 25 Tahun

1999, sehingga pemerintah daerah memiliki wewenang dan tanggung jawab yang lebih besar, baik dalam memanfaatkan potensi daerah maupun mengatasi tantangan yang dihadapi. Industri pariwisata sebagai sektor andalan di DIY, mempunyai peluang besar untuk berkembang dan memperluas kesempatan kerja, namun sekaligus menghadapi tantangan dalam memanfaatkan dan meningkatkan kualitas SDM sesuai dengan kebutuhan perkembangan pasar.

Akibat krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997, jumlah kunjungan wisatawan ke DIY pada tahun 1998 menurun drastis, yaitu sekitar 44 persen, kemudian meningkat kembali sejak tahun 1999 (Bappeda DIY, draft). Untuk mempercepat pulihnya kegiatan wisata di DIY, sejak tahun 2000 Yogyakarta kembali bangkit dengan *brand image: Jogja: Never Ending Asia*. Namun kegiatan pariwisata terutama yang berkaitan dengan wisatawan mancanegara (wisman), sangat tergantung dengan kegiatan pariwisata daerah lainnya, terutama Bali dan Jakarta. Keterkaitan tersebut berpengaruh positif dan negatif terhadap perkembangan pariwisata di Yogyakarta. Tragedi Mei 1998 dan bom Bali pada tahun 2002, merupakan contoh kasus besar yang cukup berpengaruh terhadap dunia pariwisata Indonesia, termasuk DIY, yang selama ini dikenal sebagai daerah yang relatif aman dan nyaman dari hiruk pikuk politik.

2. DINAMIKA INDUSTRI JASA PARIWISATA DAN PERSEBARANNYA

Wilayah DIY dengan luas sekitar 3.185.80 km² mempunyai potensi yang sangat besar dalam pengembangan pariwisata. Dengan modal budaya Jawa yang masih kuat, kondisi alam yang beragam, dan sebagai pusat pendidikan di Indonesia, Yogyakarta berpotensi mengembangkan berbagai jenis pariwisata, seperti wisata budaya, wisata alam, dan wisata minat khusus. Meskipun potensi pariwisata DIY tersebar di semua wilayah

Daerah Tingkat II, namun intensitas perkembangannya berbeda untuk masing-masing daerah. Pusat kegiatan pariwisata DIY berada di Kota Yogyakarta sebagai ibu kota provinsi, yang didukung oleh berbagai fasilitas dan kemudahan untuk pengembangan pariwisata.

Perkembangan Industri Pariwisata DIY

Industri jasa pariwisata di DIY berkembang sejalan dengan sejarah perkembangan kepariwisataan nasional, yang mulai serius dikelola setelah kemerdekaan Republik Indonesia (RI). Terbatasnya sumber-sumber tertulis tentang sejarah pariwisata DIY, menyebabkan tidak mudah memperkirakan kapan dimulainya kegiatan pariwisata di DIY. Beberapa narasumber memperkirakan kegiatan pariwisata di DIY sudah berlangsung lama, bersamaan dengan makin strategisnya peran wilayah ini dalam kancah perjuangan menuju kemerdekaan RI. Pada era penjajahan Belanda, yaitu sekitar tahun 1935, orang-orang Belanda sudah mengenal objek wisata di sekitar DIY, yaitu Candi Borobudur dan Prambanan (Jawa Tengah). Adapun pembenahan keraton baru dimulai sekitar tahun 1917, oleh Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) VIII. Namun sebagai obyek wisata, keraton baru dibuka secara bertahap pada era raja-raja berikutnya (HB IX dan HB X). Melalui berbagai upacara keraton, budaya Jawa makin dikenal masyarakat. Berbagai buku tentang budaya Jawa banyak tersedia di perpustakaan keraton, namun umumnya ditulis dalam bahasa Jawa, sehingga kurang dimanfaatkan masyarakat. Yogyakarta selama ini juga dianggap sebagai pusat kebudayaan Jawa (*Center of Javanese Culture*), karena raja masih aktif dan tradisi Jawa masih kuat dijalankan, baik di lingkungan keraton maupun di kalangan masyarakat lokal, sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari.

Pada awal era Orde Baru tahun 1966, pemerintah pusat mendirikan Badan Pembimbing Kepariwisata Nasional di bawah Departemen Perhubungan yang masih

berstatus Direktorat Jenderal, di bawah koordinasi Sri Sultan HB IX dan dibantu para menteri dari sektor terkait. Perhatian yang cukup besar dari Sri Sultan HB IX pada perkembangan pariwisata nasional, juga telah mengantarkan DIY menjadi daerah pariwisata yang makin dikenal baik nasional maupun internasional. Hal ini juga telah mendorong banyak pengusaha batik yang pada tahun 1970-an, mengalami kesulitan berusaha di DIY, ramai-ramai beralih usaha ke sektor perhotelan atau sektor lain yang terkait dengan kepariwisataan. Salah satu perubahan yang mencolok terjadi di kawasan Pawirotaman, yang semula didominasi pengusaha batik tradisional menjadi daerah konsentrasi turis mancanegara. Kawasan ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung sesuai dengan kebutuhan wisman seperti hotel, restoran, travel biro, toko *souvenir*, dan *money changer*. Di sepanjang jalan Pawirotaman kini tercatat sekitar 35 tempat penginapan (hotel, losmen, dan rumah inap), dan sekitar 3 dari 35 tempat penginapan tersebut berasal dari rumah pengusaha batik yang disulap jadi akomodasi untuk turis. Banyaknya wisatawan asing yang berkunjung ke kawasan ini, juga berdampak terhadap meningkatnya lapangan usaha bagi masyarakat sekitar sesuai kebutuhan turis seperti pemandu, penarik becak, ojek, usaha wartel/warnet, tukang pijat tradisional, dan jasa penterjemah.

Perkembangan pariwisata selanjutnya di DIY tidak lepas dari kepedulian dan dukungan Sultan HB X, dengan menjadikan industri pariwisata sebagai salah satu andalan pembangunan daerahnya. Komitmennya dalam pelestarian dan pengembangan budaya Jawa menjadi kekuatan atau kekhasan kepariwisataan Yogyakarta. Hal ini terlihat dari upaya kerasnya mengembalikan kegiatan pariwisata DIY dari keterpurukan akibat krisis ekonomi tahun 1997. Dengan menciptakan *brand image: Jogja Never Ending Asia*, diharapkan mampu menjadi daya penarik bagi wisatawan, investor, pengembang, organisir dari seluruh dunia untuk lebih lama tinggal di Yogyakarta.

Peristiwa bom Bali pada tahun 2002 yang banyak menewaskan wisman dari Australia, sempat menjadi kendala untuk pemulihan kegiatan pariwisata DIY yang dilakukan sejak tahun 1999 (BPS, 2001). Keterpurukan dunia pariwisata Indonesia tidak hanya menimpa Pulau Bali, namun juga berimbas ke daerah wisata lainnya, tidak terkecuali Yogyakarta. Tragedi bom Bali juga sangat mempengaruhi dunia usaha pada umumnya karena berkaitan dengan citra Indonesia di pasar global. Pasca bom Bali, diperkirakan pengunjung wisman di DIY menurun sekitar 75 persen, termasuk pembatalan berbagai pertemuan internasional yang sedianya diadakan di Kota Yogyakarta (MI, November 2002). Kondisi ini juga berpengaruh terhadap berbagai kegiatan usaha kecil terkait dengan kepariwisataan yang banyak tersebar di wilayah DIY, terutama usaha kerajinan seperti batik, kerajinan dari kulit, perak, keramik dari Kasongan, dan mainan gamelan. Meskipun banyak kasus yang mempengaruhi kegiatan pariwisata nasional dan lokal, secara keseluruhan dunia pariwisata DIY masih tertolong dengan kunjungan turis domestik yang mendominasi wisatawan ke DIY. Berdasarkan laporan BPS (2002), sekitar 94 persen dari pengunjung ke 34 obyek wisata DIY adalah wisatawan nusantara (wisnus). Hal ini berbeda dengan daerah Bali, yang kunjungan wisman menjadi andalan utama untuk kehidupan masyarakatnya. Rentannya dunia pariwisata menuntut upaya keras pemerintah untuk mengembalikan citra keamanan Indonesia di mata dunia internasional, baik melalui KBRI maupun media lainnya.

Potensi dan Persebaran Objek Wisata

Berdasarkan analisis potensi wilayah, pariwisata budaya merupakan salah satu komoditas unggulan daerah yang mendukung pembangunan DIY (Bappeda DIY, draft 2002). Pola pariwisata DIY masih bertumpu pada pariwisata budaya, sejarah, dan pendidikan, dengan obyek wisata utama

adalah keraton, candi, museum, dan perguruan tinggi. Padahal dilihat potensi wilayah DIY, wisata alam dan minat khusus merupakan objek wisata yang tersebar di semua wilayah DIY. Demikian pula setiap kunjungan wisatawan ke Yogyakarta, tidak pernah melupakan kegiatan berbelanja terutama barang-barang *souvenir* seperti batik, perak, dan barang kerajinan lain. Tampaknya wisata belanja juga merupakan alternatif wisata, dengan sentral belanja di Kota Yogyakarta khususnya Jalan Malioboro (Artha, 2000). Pada saat ini di seluruh DIY terdapat sekitar 80 objek wisata, di antaranya sekitar 46 buah merupakan wisata budaya, empat buah objek wisata agro, selebihnya merupakan wisata alam, dan minat khusus. Hampir semua wilayah di DIY memiliki potensi untuk pengembangan kegiatan usaha yang terkait dengan kegiatan pariwisata, terutama industri kerajinan, perdagangan, dan jasa. Namun perbedaan lokasi, ragam potensi yang dimiliki, fasilitas serta akses pendukung, sangat mempengaruhi perkembangan masing-masing daerah. Persebaran potensi wisata di masing-masing Daerah Tingkat II sebagai berikut:

- 1) Kota Yogyakarta, memiliki berbagai objek wisata seperti keraton, museum, kebun binatang, dan hasil kerajinan (terutama batik dan perak) dan faktor pendukung wisata yang paling lengkap seperti hotel (berbintang dan non bintang), restoran, transportasi, komunikasi, lembaga perbankan, dan sarana pendidikan.
- 2) Kabupaten Sleman (lokasi sekitar 9 km dari kota), memiliki potensi objek wisata terbanyak terutama untuk wisata budaya dan alam seperti Candi Prambanan, wisata gunung, dengan fasilitas pendukung seperti hotel berbintang (Sahid dan Puri Arta), hotel melati, transportasi, dan komunikasi serta fasilitas pendidikan.
- 3) Kabupaten Bantul (lokasi sekitar 12 km dari kota), memiliki potensi objek wisata pantai (Parangtritis dan Samas), makam Raja Imogiri dan kerajinan (keramik, kulit). Dukungan fasilitas terutama

perhotelan relatif kurang, karena pada umumnya wisatawan yang berkunjung ke Bantul, kembali dan menginap di Kota Yogyakarta.

- 4) Kabupaten Gunung Kidul (lokasi sekitar 30 km dari kota), memiliki potensi wisata pantai (Pantai Baron dan Kukup). Namun demikian, untuk mencapai objek wisata dengan lokasi terjauh dari kota, kurang didukung fasilitas yang memadai (seperti transportasi dan akomodasi).
- 5) Kabupaten Kulon Progo (lokasi sekitar 25 km dari kota), juga memiliki potensi wisata seperti Pantai Glagah, Sedang Sono, Gua Keskendo, Waduk Sermo, dan kerajinan anyaman agel. Selain lokasinya relatif jauh dari Kota Yogyakarta, objek wisata ini belum digarap secara baik dan kurang mendapat dukungan fasilitas yang memadai, sehingga objek wisata belum dikenal luas.

Berdasarkan tingkat perkembangan pariwisata, dari 139 buah objek dan daya tarik wisata (ODTW) yang sudah diidentifikasi, sebanyak 62 sudah berkembang, 46 sedang berkembang dan sisanya 31 belum berkembang (Dinas Pariwisata, DIY dan PUSPAR UGM, 1999: 17). Wilayah yang paling banyak memiliki ODTW yang sudah dan sedang berkembang adalah Kota Yogyakarta, sedangkan Kulon Progo dan Gunung Kidul memiliki ODTW paling minim. Meskipun demikian, wilayah Gunung Kidul sangat potensial untuk pengembangan ke depan, karena paling banyak memiliki ODTW yang sedang dan belum berkembang, yaitu 31 ODTW, sementara Kulon Progo hanya memiliki 10 ODTW. Dari segi jumlah objek wisata, Kabupaten Sleman tercatat memiliki objek wisata terbanyak (15 buah) dan Kota Yogyakarta justru yang paling sedikit (3 buah).

Selama tahun 1999—2000, jumlah pengunjung ke DIY mengalami peningkatan yang cukup mencolok, terutama kunjungan wisman (BPS DIY, 2001). Pada tahun 2000, lokasi wisata yang menerima kunjungan wisman terbanyak adalah Kabupaten Bantul,

sedangkan kunjungan wisatawan nusantara (wisnus) terbanyak adalah Kabupaten Sleman. Dibandingkan tahun sebelumnya (1999) terdapat pergeseran daerah yang dikunjungi wisman, yaitu dari Kota Yogyakarta ke Kabupaten Bantul (meningkat hampir 13 kali lipat). Sedangkan wisnus yang sebelumnya banyak berkunjung ke Bantul, pada tahun 2000 bergeser ke Kabupaten Sleman.

Obyek wisata budaya yang dikenal luas oleh wisatawan mancanegara (wisman) adalah keraton, Candi Borobudur, dan Candi Prambanan. Meskipun kedua candi peninggalan Agama Budha tersebut berlokasi di Provinsi Jawa Tengah, Yogyakarta banyak memperoleh keuntungan dari objek wisata ini, karena lokasinya yang relatif dekat, kebutuhan akomodasi, transportasi, dan jasa lainnya umumnya disediakan oleh Yogyakarta. Objek wisata budaya lainnya adalah makam raja-raja, Tamansari, Patilasan, kelompok seni, cagar budaya dan museum. Pada saat ini DIY juga sedang mengembangkan *Desa Wisata* sebagai objek wisata baru, dengan mengutamakan penyajian keaslian desa seperti makanan, perumahan, kehidupan masyarakat, dan tata pemerintahannya. Kini terdapat tiga desa wisata yang sedang dikembangkan, yaitu Desa Banyur di Kecamatan Tanjung (Kabupaten Sleman) dan Desa Tembi di Kecamatan Sewon (Kabupaten Bantul). Dusun Krebbe yang lokasinya berdekatan dengan Kasongan di Kabupaten Bantul, sedang dikembangkan menjadi objek wisata untuk minat khusus, yaitu usaha membuat topeng yang dihias dengan lukisan batik. Salah satu objek wisata desa yang sudah berjalan empat tahun yaitu Desa Tembi yang dirintis oleh seorang WNA dari PT Out of Asia yang bekerja sama dengan LKMD setempat dalam mengelola kerajinan dari anyaman pandan. Di samping itu, PT tersebut juga menjadi pengumpul barang-barang kerajinan dari pengrajin sekitar lokasi, yang kemudian dikemas sesuai dengan permintaan pasar global. Pengembangan desa wisata yang berbasis masyarakat ini, dimaksudkan untuk meningkatkan kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam bidang

pariwisata. Pengunjung desa wisata umumnya wisman dari Eropa, yang jarang menikmati keaslian pedesaan daerah tropis.

Pemasaran objek wisata di DIY banyak dilakukan oleh agen wisata dan hotel yang banyak terkonsentrasi di Kota Yogyakarta. Akibatnya, Kota Yogyakarta paling banyak mengambil keuntungan dari kunjungan wisatawan ke daerah-daerah lainnya (akomodasi, transportasi, restoran, dan sebagainya). Sedangkan daerah-daerah yang menjadi tujuan wisatawan, memperoleh keuntungan dari hasil kegiatan usaha perdagangan (terutama hasil kerajinan) yang dimiliki daerah tersebut. Secara umum kegiatan pariwisata DIY dengan kunjungan wisman dan wisnus selain menambah pemasukan devisa (dari wisman), juga mampu meningkatkan usaha ekonomi di berbagai bidang yang diharapkan dapat meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya.

Sarana dan Prasarana Pendukung

Kegiatan pariwisata merupakan kegiatan lintas sektoral yang memerlukan sarana dan prasarana pendukung dalam pengembangannya. Secara umum DIY memiliki berbagai fasilitas pendukung pariwisata yang cukup memadai, yaitu sekitar 400 hotel (362 hotel non-bintang), rumah makan, toko-toko cendera mata/*souvenir*, sekitar 80 biro perjalanan, bank, wartel, dan puluhan *money changer*. Meskipun potensi objek wisata tersebar di semua wilayah DIY, namun terdapat ketimpangan fasilitas dan akses yang dimiliki daerah untuk melayani wisatawan. Sarana dan prasarana pendukung kegiatan pariwisata masih terkonsentrasi di daerah perkotaan, yaitu Kota Yogyakarta dan Sleman, sedangkan di daerah lainnya seperti Kabupaten Gunung Kidul dan Kulon Progo, fasilitas pendukung masih sangat terbatas. Kota Yogyakarta memiliki fasilitas akomodasi yang paling banyak dan lengkap, baik hotel berbintang maupun hotel melati dibandingkan daerah lainnya (BPS DIY, 2001). Wilayah

Kulon Progo yang lokasinya paling jauh dari Kota Yogyakarta, memiliki fasilitas pendukung paling minim. Akibatnya terjadi ketimpangan dalam pelayanan turis antara Kota Yogyakarta, Bantul, dan Sleman di satu sisi dengan wilayah-wilayah lainnya, yaitu Gunung Kidul dan Kulon Progo. Biro-biro perjalanan yang umumnya berada di Kota Yogyakarta (seperti PT Nitour dan PT Ramatour) kebanyakan merupakan cabang dari biro perjalanan di Bali dan Jakarta, sehingga sulit untuk berhubungan langsung dengan pihak konsumen di luar negeri.

Wilayah Kabupaten Bantul yang lokasinya berdekatan dengan Kota Yogyakarta, tidak memiliki banyak faktor pendukung seperti fasilitas akomodasi, karena para turis umumnya memanfaatkan fasilitas yang tersedia di Kota Yogyakarta. Namun untuk daerah Gunung Kidul dan Kulon Progo yang relatif jauh, tanpa fasilitas pendukung dan akses yang memadai, perkembangan potensi yang tersedia menjadi terhambat, sehingga relatif jarang dikunjungi turis. Tersedianya fasilitas pendukung yang diperlukan turis dan disesuaikan dengan kemampuan daerah, dapat meningkatkan daya tarik daerah sehingga dapat menahan turis lebih lama di daerah tersebut. Data pada tahun 2001 menunjukkan secara keseluruhan rata-rata turis menginap di DIY masih relatif rendah, yaitu 3,53 hari untuk wisman dan 2,32 hari untuk wisnus. Demikian pula tingkat hunian hotel yang hanya mencapai sekitar 34 persen untuk hotel berbintang, dan sekitar 33 persen non-bintang (BPS DIY, 2001).

Faktor pendukung lain yang belum dimiliki DIY adalah fasilitas bandara udara yang bertaraf internasional, yang sangat diperlukan untuk meningkatkan kunjungan langsung wisman. Akibatnya wisman yang berkunjung ke DIY umumnya hanya sebatas transit, atau menjadi bagian dari paket nasional dan limpahan wisatawan dari Bali dan Jakarta. Dibangunnya *airport* internasional di Kota Surakarta, belum dapat dimanfaatkan secara optimal, karena tidak mampu menjadi landasan pesawat berbadan besar. Sampai sekarang upaya untuk menjadikan Bandara

Adisucipto sebagai bandara internasional, masih menemui banyak kendala, baik karena masalah internal (keterbatasan lahan) maupun alasan politis.

3. OTONOMI DAERAH, PEMBANGUNAN EKONOMI DAN INDUSTRI PARIWISATA

Selama ini kegiatan pariwisata merupakan kegiatan sektoral yang sentralistik, sehingga banyak perencanaan pembangunan sektoral yang kurang sesuai dengan prioritas unggulan masing-masing wilayah, dan kurang efisien dalam pelaksanaannya. Sejalan dengan semangat penerapan OTDA (UU No. 22 dan No. 25 Tahun 1999), maka kewenangan Pemda Tingkat II dalam menyusun kebijaksanaan pembangunan daerah menjadi lebih besar daripada era sebelumnya. Kewenangan pengaturan kebijaksanaan pariwisata juga lebih mengacu pada kebutuhan daerah masing-masing, namun tetap harus sejalan dengan program nasional. Sebaliknya, kewenangan Dinas Pariwisata Tingkat I justru makin berkurang, termasuk untuk bidang kepariwisataan, yaitu sebatas membantu daerah dalam pembinaan dan promosi pariwisata baik di dalam maupun luar negeri.

Perkembangan Ekonomi dan Industri Pariwisata

Perkembangan ekonomi suatu wilayah biasanya dinilai dari pertumbuhan PDRB yang bersumber dari berbagai sektor. Sebagai salah satu subsektor unggulan, industri jasa pariwisata DIY mampu memberi sumbangan yang berarti bagi pembangunan wilayah, baik dari segi penyerapan tenaga kerja maupun sumbangan terhadap PDRB. Seperti pada penyerapan tenaga kerja, data yang pasti tentang sumbangan sektor jasa pariwisata terhadap PDRB di DIY, juga tidak tersedia. Akan tetapi, karena kegiatan pariwisata bersifat multisektoral, maka secara makro semua sektor ekonomi yang menyumbang PDRB, langsung dan tidak langsung juga

berkaitan dengan kegiatan pariwisata. Beberapa sektor ekonomi yang dianggap terkait langsung dengan kegiatan industri jasa pariwisata, antara lain sektor perdagangan, jasa dan industri pengolahan antara lain hotel dan restoran, hiburan dan rekreasi, angkutan, industri *souvenir*, keuangan dan jasa lainnya di sektor informal.

Akibat krisis ekonomi, semua sektor usaha mengalami penurunan dalam pertumbuhan, sehingga selama tahun 1997—1998 pertumbuhan lapangan usaha menurun drastis (sekitar minus 11 persen), termasuk sektor yang berkaitan dengan kegiatan kepariwisataan. Namun sejak tahun 1999 terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi sektoral meskipun kecil (sekitar satu persen pada tahun 2000) atau sekitar tiga persen berdasarkan harga konstan 1993 (PDRB Propinsi DIY, 2000). Kontribusi tertinggi dari peningkatan ini terjadi pada sektor jasa (sekitar 20 persen), perdagangan (sekitar 16 persen), sektor industri (sekitar 13 persen), dan sektor transportasi (di atas 10 persen). Oleh karena sektor-sektor ini terkait erat dengan kegiatan pariwisata, dan kunjungan wisatawan juga mengalami kenaikan pesat pada tahun tersebut (khususnya wisman), maka dapat dipastikan terdapat peran penting sektor jasa pariwisata dalam sumbangan terhadap PDRB daerah. Perbandingan PDRB menurut daerah, menunjukkan perkembangan PDRB tertinggi tetap pada Yogyakarta dan Sleman, sedangkan terendah adalah Kulon Progo (BPS DIY, 2001).

Sumbangan PAD dari sektor perdagangan relatif besar terutama di Kodya Yogyakarta dan Sleman. Jalan Malioboro di Kota Yogyakarta masih mempunyai daya tarik tinggi bagi wisatawan, khususnya untuk wisata belanja. Demikian pula sebagai “mitos”, Malioboro tetap dipertahankan bagi kegiatan pariwisata, baik domestik maupun global. Berbagai kegiatan perdagangan baik pertokoan maupun kaki lima (seperti warung makan *lesehan* dan *souvenir*), merupakan daya tarik bagi wisatawan, sehingga secara ekonomi sangat menguntungkan bagi

masyarakat Yogyakarta. *Souvenir* yang banyak diminati oleh wisman adalah batik, barang seni, dan kerajinan perak dari Kotagede. Masa puncak kunjungan wisnus adalah masa libur sekolah (sekitar bulan Juni – Juli), dan untuk wisman sebanyak dua kali yaitu pada bulan Juli/Agustus dan Desember/Januari. Kunjungan wisman yang meningkat dari berbagai negara khususnya dari Asia, berdampak terhadap munculnya banyak *home-stay* di Jalan Kaliurang. Sampai sekarang sumbangan pariwisata terhadap sektor pertanian belum banyak digarap, kecuali yang sudah dikenal luas adalah salak pondoh dari Sleman. Tetapi secara keseluruhan Yogyakarta yang sumber ekonominya relatif terbatas, kegiatan pariwisata dapat diandalkan sebagai “jantung ekonomi” dari wilayah tersebut.

Sektor angkutan terkait erat dengan kegiatan pariwisata, baik langsung berkaitan dengan transportasi untuk wisatawan maupun angkutan yang berfungsi melancarkan kegiatan pasar. Apabila kegiatan pariwisata menurun, maka PAD yang bersumber dari kegiatan masyarakat di kota (Yogyakarta dan Sleman) sangat terpengaruh. Hal ini terlihat dari meningkatnya PAD pada bulan-bulan puncak kunjungan wisman, terutama dari Jepang, Korea, Singapore, Belanda, Jerman, dan Australia. Sebagai kota pelajar dengan fasilitas pendidikan yang relatif lengkap, Yogyakarta dan Sleman selalu ramai dikunjungi pelajar dan mahasiswa dari berbagai penjuru tanah air, terutama pada masa libur sekolah dan permulaan tahun ajaran baru. Hal ini bahkan mendorong beberapa pengusaha hotel untuk menyediakan hotel/kamar khusus untuk wisnus pada masa liburan sekolah. Kunjungan wisnus secara periodik ini juga berdampak pada daerah-daerah lainnya, terutama yang potensial sebagai daerah penghasil kerajinan, seperti Bantul. Sumbangan PAD juga berasal dari ekspor barang jadi terutama pakaian jadi, mebel kayu, dan kulit yang mencapai sekitar 75 persen dari nilai ekspor ke berbagai negara. Kegiatan ekspor ini potensial semakin berkembang, sejalan dengan meningkatnya

kunjungan wisman ke DIY, sehingga menjadi penggerak roda ekonomi di wilayah penghasil produk tersebut.

Kebijakan Pariwisata dan Tantangan Pembangunan Daerah

Secara nasional, Indonesia berpotensi untuk menempatkan industri pariwisata sebagai salah satu produk unggulan di sektor non-migas. Bidang pariwisata yang terkait dengan berbagai sektor (*cross sectoral*), cenderung dapat diandalkan sebagai sumber devisa, sekaligus dapat memperluas kesempatan kerja di berbagai sektor, yang diharapkan dapat membantu pemulihan ekonomi pasca-krisis.

Pengembangan industri pariwisata sebagai salah satu bagian penting dari rencana pembangunan daerah DIY, dapat dilihat dari rencana pembangunan DIY untuk lima tahun ke depan, yang menekankan visi dan misi pembangunan daerah pada aspek pariwisata. Salah satu misi pembangunan yang berkaitan langsung dengan pengembangan pariwisata sesuai dengan rencana pembangunan DIY 2001—2005 (Bappeda DIY, draft: 28), adalah:

“Menjadikan DIY sebagai daerah tujuan utama wisata MICE (Meeting, Incentive, Conference and Exhibition) di Indonesia dan sekaligus mengembalikan posisi DIY sebagai daerah tujuan wisata kedua setelah Bali, yang didukung posisi DIY sebagai simpul strategis dan penting dalam perhubungan dan komunikasi di Pulau Jawa”.

Dalam rencana program pembangunan daerah, bidang pariwisata diandalkan sebagai salah satu pemulihan ketahanan ekonomi daerah, di samping beberapa bidang lain seperti industri, perdagangan, dan pertanian dalam arti luas. Potensi pariwisata yang tersebar di setiap wilayah DIY memungkinkan pariwisata dapat berfungsi sebagai salah satu elemen pengembangan wilayah tersebut, bahkan berperan penting dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi DIY. Hal ini terbukti dengan banyaknya sektor terkait yang

mengalami kemerosotan, sebagai dampak menurunnya jumlah wisatawan ke DIY di masa krisis. Oleh karena itu, hal terpenting yang harus diupayakan di bidang pariwisata adalah meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke Yogyakarta. Untuk pengembangan potensi produk wisata di setiap wilayah DIY, dan mengakomodasi perkembangan permintaan pasar pariwisata, maka ditetapkan tiga kawasan pengembangan pariwisata daerah (KPPD) yaitu bagian utara, tengah, dan selatan, masing-masing untuk wisata alam, wisata budaya dan wisata pantai. Perencanaan pengembangan kepariwisataan di DIY didukung oleh strategi pengembangan kepariwisataan DIY berdasarkan kawasan pengembangan, dengan menjabarkan setiap kawasan dalam berbagai komponen, antara lain obyek wisata, akomodasi, sarana dan prasarana, SDM, dan fasilitas penunjang. Komponen-komponen tersebut saling berkaitan sehingga untuk memperoleh hasil yang optimal diperlukan kebijakan yang terpadu.

Pemerintah DIY masih menghadapi pelbagai tantangan dalam mencapai keberhasilan industri pariwisata yang komprehensif sesuai dengan arah kebijakan. Salah satu tantangan penting adalah koordinasi antarsektor terkait, serta kerja sama antar *stakeholder* yang melibatkan antara lain birokrasi, swasta (pengusaha) serta masyarakat luas. Aspek koordinasi merupakan salah satu kelemahan utama dalam mensukseskan program kegiatan yang memerlukan sinergi dan keterpaduan dalam pelaksanaannya.

Tantangan lainnya adalah tingkat kemandirian DIY dalam pengembangan bidang pariwisata, dibandingkan daerah wisata lain yang relatif lebih maju, yaitu Bali dan Jakarta. Banyak paket wisata ke DIY, terutama untuk wisman, dikuasai pelaku wisata di Bali dan Jakarta. Keadaan ini dapat berdampak positif dan negatif terhadap perkembangan industri pariwisata di DIY. Dunia pariwisata yang rentan terhadap gejolak sosial politik, juga menempatkan DIY pada

situasi yang dilematis, meskipun selama ini DIY relatif aman dari berbagai gangguan sosial politik. Berbagai tragedi nasional yang terjadi akhir-akhir ini, seperti bom Bali secara langsung berdampak pada makin terpuruknya dunia pariwisata nasional dan regional. Meskipun dampak yang dirasakan dunia pariwisata DIY tidak separah Bali, namun banyak paket wisata nasional berkaitan dengan kunjungan ke DIY ditunda atau dibatalkan, sehingga mengganggu kegiatan usaha yang terkait dengan kunjungan wisman.

Agen perjalanan merupakan inspirator kegiatan pariwisata DIY, namun demikian hampir semua agen perjalanan utama di DIY terkait dengan agen di daerah wisata Bali dan Jakarta. Hal ini sejalan dengan sejarah pariwisata nasional, yang diawali dengan penunjukan agen perjalanan tertentu sehingga memiliki hak monopoli pengaturan wisatawan ke berbagai tujuan wisata. Posisi yang kurang menguntungkan bagi pariwisata DIY, diharapkan dapat diperbaiki pada era OTDA, karena banyak fungsi sektoral yang kini menjadi wewenang pemerintah daerah, termasuk kegiatan bidang pariwisata yang memerlukan dukungan dari sektor lainnya. Salah satu dampak yang dirasakan dunia pariwisata DIY adalah paket *tour* sehari untuk DIY sebagai bagian dari tur nasional, umumnya dengan tujuan ke objek wisata budaya seperti Candi Borobudur, Prambanan, dan keraton.

Untuk mengantisipasi pengembangan pasar global, sebagai dampak makin pudarnya batas negara (*borderless*), DIY telah menyiapkan perangkat untuk kemudahan investasi atau kerja sama/kemitraan dengan daerah atau negara lain, dalam bentuk *sister city* atau *sister state*, yang dapat dimanfaatkan untuk peningkatan kegiatan pariwisata. Sejak tahun 1995 Kota Yogyakarta berhasil menjalin hubungan persahabatan dengan Kota Kyoto di Jepang (*sister city*), dengan California, AS dan dengan provinsi di Austria (*sister state*). Kini upaya yang masih terus gigih dilakukan pemerintah daerah adalah meningkatkan Bandara Adisucipto menjadi bandara internasional, agar

kunjungan wisman khususnya dari negara-negara Asia, tidak tergantung pada kegiatan pariwisata daerah lainnya. Upaya ini masih terganjal oleh kondisi fisik bandara (ketersediaan lahan) dan kesulitan mengadakan kesepakatan dengan pihak pemilik bandara (AURI).

4. SUMBER DAYA MANUSIA DAN KEBIJAKAN KETENAGAKERJAAN DI INDUSTRI PARIWISATA

Penduduk dan Kesempatan Kerja

Hasil registrasi penduduk tahun 2000 menunjukkan jumlah penduduk Provinsi DIY sekitar 3,3 juta orang, lebih dari separuhnya adalah perempuan. Penduduk tersebut tersebar di lima wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk rata-rata sekitar 1.034 orang per km², dengan variasi Kota Yogyakarta sebagai wilayah terpadat (sekitar 15.000 orang per km²) dan Kabupaten Gunung Kidul sebagai wilayah terjarang penduduknya (sekitar 500 orang per km²). Pertumbuhan penduduk DIY juga relatif rendah (sekitar 0,72 persen pada tahun 2000), dengan variasi tingkat pertumbuhan tertinggi yaitu Sleman dan terendah adalah Kota Yogyakarta (sekitar -0,4 persen). Dari jumlah penduduk tersebut sekitar separuhnya berpartisipasi aktif dalam berbagai lapangan pekerjaan, terutama pertanian (sekitar 43 persen), perdagangan, hotel, dan restoran (sekitar 19 persen), jasa (sekitar 13 persen) dan industri pengolahan (13 persen) (BPS DIY, 2000).

Berdasarkan data tahun 2000, tingkat pengangguran terbuka sekitar 2,3 persen, mayoritas penganggur berpendidikan SLTA. Seperti daerah lainnya, lowongan kerja yang tersedia (permintaan tenaga kerja yang terdaftar di Disnaker DIY, belum termasuk, pekerjaan informal) tercatat jauh lebih rendah daripada jumlah pencari kerja (sekitar delapan persen). Meskipun kegiatan pariwisata merupakan andalan kegiatan ekonomi di DIY,

namun berdasarkan data statistik kegiatan utama penduduk DIY masih tetap didominasi oleh sektor pertanian. Hal ini berkaitan dengan kesulitan memperoleh data yang pasti tentang jumlah angkatan kerja yang terlibat di sektor kepariwisataan. Kegiatan industri pariwisata yang umumnya bersifat lintas sektoral, memungkinkan beberapa lapangan usaha seperti jasa, perdagangan, industri pengolahan, dan angkutan, berkaitan erat satu dengan lainnya. Apabila asumsi tersebut benar, dapat diperkirakan sekitar separuh angkatan kerja terlibat pada lapangan usaha yang berkaitan dengan kegiatan pariwisata. Proporsi ini mungkin bertambah, karena banyak mahasiswa yang di samping kuliah, juga terlibat bekerja di berbagai sektor yang terkait dengan kepariwisataan seperti pemandu wisata, penerjemah, pendidikan, dan organisasi masyarakat (dalam statistik termasuk bukan angkatan kerja). Demikian pula banyak anggota masyarakat yang terlibat dalam pekerjaan informal yang berkaitan langsung dengan pariwisata seperti tukang ojek, becak, dan pedagang-pedagang kaki lima, yang umumnya tidak tercatat dalam statistik.

Kesempatan kerja yang tersedia di DIY didominasi oleh sektor-sektor informal terutama sektor ekonomi rakyat. Adapun kesempatan kerja di sektor formal, sulit tersedia secara luas dan merata, karena berkaitan dengan kebutuhan tenaga kerja yang mempunyai kualifikasi pendidikan tertentu, sesuai dengan kebutuhan. Keadaan ini menyebabkan pengangguran meningkat khususnya di kalangan angkatan kerja terdidik (SLTA dan Perguruan Tinggi) (BPS DIY, 2001). Meskipun terdapat kesulitan dalam menghitung jumlah kesempatan kerja yang tersedia terkait dengan kegiatan pariwisata, namun tidak dapat disangkal bahwa kegiatan pariwisata menyediakan kesempatan kerja yang relatif besar, baik yang langsung sebagai pelaku pariwisata, maupun lapangan usaha dari sektor-sektor terkait. Dominannya sektor tersier dalam struktur lapangan usaha di DIY (seperti perdagangan, pengangkutan dan komunikasi, keuangan dan jasa), menunjukkan

bahwa kegiatan pariwisata telah berperan penting dalam penyerapan tenaga kerja selama ini. Kebijakan yang telah disusun dalam RIPPDA DIY sampai tahun 2018, merencanakan peningkatan penyerapan tenaga kerja di DIY dari sektor pariwisata sebesar 1.009.840 pada tahun 2018.

Kualitas SDM di Bidang Pariwisata

Dalam era globalisasi persaingan usaha semakin ketat sehingga dibutuhkan SDM yang dapat bekerja secara profesional. Meskipun DIY memiliki banyak SDM yang relatif berkualitas, namun kondisi SDM pada institusi manajemen dan masyarakat yang terkait dengan pariwisata belum menunjukkan kinerja yang optimal. Hal ini berkaitan dengan kondisi SDM baik kuantitas dan kualitas pada lembaga pemerintah (Dinas Pariwisata Tingkat I dan II) dan lembaga swasta. Pada lembaga swasta mencakup semua tenaga kerja yang berkaitan dengan bidang usaha jasa pariwisata (biro/agen perjalanan wisata, jasa pramuwisata, dan jasa konsultan pariwisata), kelompok usaha objek dan daya tarik wisata dan usaha sarana wisata (seperti hotel, restoran, transportasi, rekreasi, dan hiburan) dan kelompok pemikir atau pengembang pariwisata. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pariwisata Kodya Yogyakarta (1999: III-25), hampir semua karyawan di Dinas Pariwisata DIY (96 orang) berlatar belakang pendidikan bukan bidang kepariwisataan. Kesempatan meningkatkan pendidikan bagi karyawan pada Dinas Pariwisata umumnya melalui kursus, pendidikan berjenjang, serta pendidikan dan latihan (diklat), biasanya lebih untuk kepentingan peningkatan karier dan jenjang kepegawaian, daripada untuk meningkatkan kemampuan di bidang yang menjadi tugasnya.

Peningkatan kunjungan wisatawan ke DIY yang terjadi sampai tahun 1997, telah meningkatkan jumlah tenaga kerja pada lembaga swasta keparawisataan sekitar 22 persen selama 1995—1997. Demikian pula dari sisi penyerapan tenaga kerja, bidang

pariwisata mampu menyerap tenaga kerja lebih banyak (sekitar 6000 orang untuk periode 1993—1997), dan diperkirakan jauh lebih besar, apabila termasuk tenaga kerja yang terlibat di usaha sektor non-formal. Namun dilihat dari segi kualitas SDM yang bekerja di sektor swasta kepariwisataan, seperti pada sektor pemerintah, sebagian besar berpendidikan umum dan kejuruan non-pariwisata, meskipun jumlah SDM yang berlatar belakang pendidikan kejuruan pariwisata meningkat. Kelemahan SDM pariwisata terutama pada kesiapan pihak birokrasi sebagai pelaku kebijakan pariwisata DIY. Hal ini terkait dengan perubahan wewenang dan fungsi akibat penerapan OTDA, masalah eselonisasi serta pergantian jabatan dan pimpinan, yang menyebabkan banyak pejabat kurang menguasai permasalahan pariwisata.

Di kalangan kelembagaan swasta pada umumnya, merasa cukup memiliki SDM pariwisata untuk menyongsong perkembangan pariwisata di daerahnya, terutama dalam bidang akomodasi, penyediaan atraksi, dan pelayanan turis lainnya. Namun demikian, mereka merasa masih perlu meningkatkan kualitas SDM untuk meningkatkan daya saing, agar dapat berkompetisi di pasar wisata nasional maupun global. Merosotnya kunjungan wisman ke DIY maupun Indonesia secara keseluruhan akibat berbagai kasus, dianggap sebagai kelemahan peran *public relation*, yang dianggap gagal dalam mengantisipasi berbagai isu negatif tentang Indonesia. Peran KBRI dinilai lemah dalam membantu promosi pariwisata daerah, sehingga wawasan wisman terbatas pada daerah-daerah tertentu yang sudah mapan. Peran pemerintah (Departemen Pariwisata) sangat penting dalam menghadapi permasalahan nasional dan global yang berdampak terhadap pariwisata regional maupun nasional.

Sebagai kota yang menyandang predikat kota pelajar, migrasi masuk dari berbagai daerah setiap tahun cukup tinggi, terutama untuk melanjutkan ke Perguruan

Tinggi (PT). Sampai tahun 1994/1995 Yogyakarta memiliki empat buah PT negeri, 55 PT swasta dan tiga PT kedinasan, dengan proporsi terbesar mahasiswa ditampung di UGM (Dinas Pariwisata Kodya Yogyakarta, 1999: II-7). Berdasarkan ketersediaan fasilitas sarana pendidikan pariwisata yang berada di DIY, kemampuan SDM pariwisata masih dapat ditingkatkan. Untuk meningkatkan profesionalisme di bidang kepariwisataan, kebijaksanaan tentang pengembangan SDM dirumuskan dalam RIPPD DIY sebagai berikut:

“Mengembangkan SDM dengan meningkatkan keterkaitan dan kesepadanan pendidikan pariwisata dengan peluang kerja sektor pariwisata, meningkatkan standar kompetensi SDM pelayanan pariwisata, pembinaan, dan pengembangan SDM diarahkan pada sikap mental pelaku pariwisata terutama dalam pelayanan sehingga mampu menjaga citra kepariwisataan DIY”. (Bappeda DIY, draft:54).”

Untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut perlu peningkatan SDM dari birokrasi terkait dengan jalan melakukan kerja sama dengan lembaga-lembaga pendidikan yang terkait dengan permasalahan pariwisata. Kerja sama ini telah dirintis untuk penyusunan RIPPD DIY yang bekerjasama dengan PUSPAR UGM. Lembaga pemikir pariwisata lainnya di Yogyakarta adalah STUPPA (Studio Perencanaan Pariwisata) yang telah banyak membantu pengembangan pariwisata DIY, terutama berkaitan dengan wisata konvensi.

Kondisi Sosial Budaya

Salah satu daya penarik pariwisata di DIY adalah wisata budaya, yang berarti diperlukan kemampuan untuk mengemas berbagai aset budaya yang dimiliki, sehingga dapat memenuhi permintaan pasar baik nasional maupun global. Hal penting lainnya adalah sikap kepedulian masyarakat setempat terhadap perkembangan pariwisata di daerahnya, sehingga dapat menerima pariwisata sebagai bagian dari kehidupan masyarakat di daerahnya. Kondisi sosial

budaya masyarakat dapat dilihat dari struktur masyarakat dan keterlibatan masyarakat dalam berbagai kegiatan kepariwisataan, baik di tingkat penyusunan paket-paket pariwisata maupun dalam kegiatan yang terkait dengan pariwisata. Sebaliknya dari sisi perkembangan sosial budaya, kegiatan pariwisata juga merupakan tantangan bagi masyarakat untuk mengadakan inovasi atau penyesuaian sehingga paket-paket budaya dapat memenuhi tuntutan pasar pariwisata.

Struktur masyarakat DI Yogyakarta tergolong heterogen karena sebagian penduduknya adalah para pelajar dan mahasiswa yang berasal berbagai etnis dan daerah asal. Hal ini memungkinkan timbulnya sikap kurang peduli terhadap *image* kota tempat tinggal “sementara” mereka. Pada masyarakat yang relatif heterogen ini, juga memungkinkan dukungan terhadap kegiatan pariwisata lebih beragam atau sulit untuk menciptakan sikap “*tourism minded*”, seperti di Bali yang struktur masyarakatnya relatif homogen. Bagi sebagian besar masyarakat Bali, peran pariwisata dalam kehidupan mereka merupakan “hidup dan mati”, sehingga kehidupan ritual sehari-hari masyarakat Bali dapat dikemas dengan baik dan siap “dijual” untuk kemajuan industri pariwisata. Secara singkat dapat dikatakan Bali memiliki tiga syarat utama untuk perkembangan pariwisata, yaitu produk, pasar dan SDM. Adapun Yogyakarta baru memiliki produk dan pasar, namun SDM masih terbatas pada pelaku langsung kegiatan pariwisata. Bagi masyarakat yang umumnya lebih plural dari segi etnis, agama dan daerah asal, kegiatan pariwisata sebagai bagian dari kehidupan saja. Bahkan sebagian kecil seniman di Yogyakarta masih mempunyai hambatan budaya dan menganggap pengembangan pariwisata sebagai pelacuran budaya (*cultural prostitution*). Kendala lain yang dihadapi industri pariwisata di DIY adalah masih rendahnya “sadar wisata” dari masyarakat Yogyakarta yang relatif heterogen. Hal tersebut dapat mempengaruhi animo

masyarakat dalam mendukung kegiatan pariwisata.

Sebagian dari masyarakat Yogyakarta adalah pendatang yang diterima secara baik oleh masyarakat lokal yang umumnya sebagai petani dan priyayi. Bagi masyarakat lokal setiap pendatang yang tinggal di Yogyakarta dianggap rakyat Yogya yang berhak mendapat pengayoman yang sama dari Sultan Yogyakarta (tidak ada diskriminasi antara pendatang dan asli). Sebelum tahun 1990-an, masyarakat Yogyakarta bersikap masa bodoh terhadap pendatang, yang penting 'Yogya maju'. Namun sesudah tahun 1990-an, masyarakat asli makin terdesak dan menyadari bahwa makin banyak aset ekonomi yang terjual pada pendatang yang umumnya lebih sukses. Dalam memenuhi tuntutan pasar pariwisata, para pendatang yang umumnya pengusaha lebih siap melakukan berbagai inovasi dalam hasil kerajinan mereka, sehingga lebih mampu memenuhi tuntutan pasar. Sebagai contoh seni batik sekarang berkembang lebih modern, baik bahan, motif, maupun warnanya. Inovasi yang mencolok adalah berkembangnya teknologi *batik cap* dan *printing* sesuai dengan tuntutan pasar, menggantikan batik tradisional (*batik tulis*) yang semakin terdesak di pasaran. Wisman cenderung lebih menyukai batik *printing* atau batik cap yang dipasarkan sebagai barang-barang *souvenir* daripada batik sebagai kain tradisional. Namun demikian, sebagai pusat budaya Jawa, Yogyakarta masih memiliki tradisi-tradisi yang tetap dipertahankan dan dilestarikan, dengan keraton sebagai simbol pertahanan budaya. Meskipun kini keraton dalam batas tertentu dibuka untuk keperluan pariwisata, namun kesakralan dalam berbagai upacara tradisi tetap dilestarikan.

Banyaknya pendatang ke Yogya tidak mempengaruhi pelaksanaan kebudayaan Jawa yang telah mengakar pada masyarakat lokal. Hal ini ditunjang oleh peran sentral keraton serta peran Sri Sultan sebagai tokoh sentral dalam menjaga kelestarian kebudayaan Jawa. Dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, masih sarat dengan nuansa tradisional,

termasuk penerapan berbagai upacara yang menandai perjalanan hidup seseorang. Demikian pula pola perilaku sebagian besar masyarakat Yogyakarta tidak lepas dari pemahaman falsafah Jawa, yang dalam pergaulan tampak sebagai perilaku sopan-santun, menjaga perasaan orang lain, sampai dengan penggunaan bahasa Jawa sesuai dengan tingkat status sosialnya. Budaya Jawa di lingkungan keraton lebih menonjol penerapannya dan sangat dijaga kelestariannya sehingga tidaklah berlebihan apabila Yogyakarta dikenal sebagai pusat dari kebudayaan Jawa. Sejalan dengan perkembangan pariwisata di Yogyakarta, sesuai dengan tuntutan pasar, diperlukan ekspose kebudayaan Jawa yang lebih terbuka, terutama di lingkungan keraton, namun dengan tetap menjaga kesakralan dan kelestariannya. Adapun bagi wisatawan peminat khusus dapat mendalami budaya Jawa melalui berbagai cara seperti perpustakaan keraton, museum, mengikuti upacara-upacara agung dengan pemandu khusus keraton dan mempelajari berbagai tarian Jawa, termasuk tarian khusus yang selama ini dilakukan bersamaan dengan upacara-upacara agung di keraton.

Kebijakan Ketenagakerjaan di Bidang Kepariwisataan

Krisis ekonomi yang berkepanjangan sejak tahun 1997, berdampak signifikan terhadap penurunan laju pertumbuhan ekonomi DIY, sehingga tingkat pengangguran meningkat dari sekitar 2,5 persen menjadi 4,7 selama tahun 1990—1999. Krisis ekonomi juga telah menurunkan kesempatan kerja formal dan meningkatkan kesempatan berusaha di sektor informal. Kondisi demikian mendorong pemerintah DIY untuk menentukan kebijakan pembangunan yang dapat diandalkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi sekaligus memperluas kesempatan kerja. Industri jasa pariwisata, sebagai salah satu sektor andalan di DIY, terbukti telah berperan penting dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yang merupakan modal dalam upaya

perluasan kesempatan kerja. Kegiatan pariwisata yang merupakan kegiatan *cross sectoral* juga mempunyai efek ganda terhadap perkembangan sektor-sektor lainnya, sehingga dapat menggerakkan roda perekonomian dan potensial membuka lapangan kerja sektoral. Meskipun demikian masih banyak potensi wilayah yang belum berkembang, sehingga terjadi ketimpangan wilayah dalam perkembangan pariwisata. Akibatnya penciptaan lapangan kerja lebih terpusat di beberapa wilayah yang relatif lebih memiliki fasilitas dan akses dibandingkan wilayah lain. Keadaan ini semakin menyulitkan pemerataan pembangunan yang akan berpengaruh terhadap pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Tekad pemerintah DIY untuk menjadikan wilayahnya sebagai daerah tujuan utama wisata Indonesia, diharapkan mampu meningkatkan PAD dan kesejahteraan masyarakat umumnya. Untuk mencapai kondisi tersebut salah satu komitmen yang ingin dicapai dalam kaitan dengan bidang ketenagakerjaan adalah pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Untuk itu diperlukan suatu perencanaan kebijaksanaan pengembangan pariwisata yang dapat mengarahkan program sehingga berhasil guna seperti yang diharapkan. Beberapa parameter yang digunakan saat ini untuk mengukur keberhasilan pengembangan pariwisata, antarlain pemasukan devisa, jumlah wisatawan, lama tinggal, jumlah belanja dan penciptaan lapangan kerja dan usaha (Dinas Pariwisata dan PUSPAR UGM, 1999).

5. ISU POKOK KETENAGAKERJAAN: PELUANG DAN TANTANGAN

Indonesia sebagai anggota APEC dan salah satu negara yang turut menandatangani perjanjian WTO pada tahun 1994, memastikan diri termasuk dalam arus globalisasi ekonomi atau sistim pasar bebas yang akan diberlakukan secara bertahap sebelum tahun 2020. Dengan demikian,

Indonesia harus menyiapkan diri untuk menerima semua konsekuensi dari ciri globalisasi ekonomi, termasuk resiko makin menipisnya batas antarnegara (*borderless*) dalam kegiatan pariwisata. Konsekuensi positif yaitu makin terbukanya pasar bagi perluasan usaha atau perluasan kesempatan kerja antarnegara, karena restriksi yang makin berkurang. Namun sebaliknya, keterbukaan pasar ini juga sebagai tantangan yang tidak ringan karena adanya kompetisi yang makin ketat untuk memenangkan persaingan global (Thoha, 2001).

Tantangan dunia pariwisata makin berat dengan kondisi sosial politik yang belum stabil, sehingga posisi daya saing Indonesia makin lemah baik di antara negara-negara ASEAN maupun Asia Pasifik. Suseno (internet, 2002) mengingatkan bahwa sistem globalisasi yang lebih banyak menguntungkan negara kapitalis dengan kekuatan modal dan teknologinya, berpotensi mempersempit ruang untuk menciptakan keadilan pembangunan, terutama bagi kelompok masyarakat lemah yang kini makin membengkak akibat krisis. Kegiatan industri pariwisata dengan segala konsekuensinya akan bersentuhan dengan "*human being*", yang merupakan subjek dan objek dari kegiatan pariwisata tersebut. Sebagai subjek berarti masyarakat setempat berperan sebagai pelaku yang dapat mendukung atau menghambat keberhasilan program pariwisata. Sebagai objek, masyarakat akan menerima segala konsekuensi dari adanya kegiatan pariwisata di daerahnya, baik yang positif maupun negatif. Sebagai industri jasa, peran SDM sangat penting dalam pengembangan pariwisata. Diharapkan DIY yang lebih memiliki SDM yang berkualitas dibandingkan kekayaan SDA, dapat memanfaatkannya secara optimal untuk pengembangan pariwisata (Tahajudin dan Susanto, 1996).

Pengaruh globalisasi terhadap Industri pariwisata semakin nyata karena berdasarkan hasil kajian empiris terjadi peningkatan kegiatan pariwisata di berbagai negara, dalam tiga dekade terakhir. Hal ini tidak terlepas dari

kemajuan pesat dalam bidang teknologi informasi dan transportasi dalam skala global. Globalisasi juga dapat bermata ganda, di satu sisi sebagai peluang untuk memperluas pasar dan di sisi lain sebagai tantangan dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat. Dengan makin tipisnya batas antarnegara, maka peluang usaha jasa negara lain juga makin bebas keluar masuk Indonesia. Pariwisata Indonesia secara nasional akan menghadapi persaingan yang ketat dari negara lain yang sudah lebih berpengalaman. Pada bagian ini penekanan isu-isu ketenagakerjaan berkaitan dengan peluang kesempatan kerja maupun tantangan kualitas SDM dalam menghadapi OTDA dan globalisasi.

Peluang Penciptaan Kesempatan Kerja

Industri jasa pariwisata DIY telah berperan penting sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi daerah sehingga turut mendorong terciptanya kesempatan kerja baik langsung maupun tidak langsung. Namun demikian, peran penting pariwisata ini kurang tercermin dalam perencanaan pembangunan daerah sehingga perkembangan kegiatan sektoral masih sporadis dan belum tersinergi dalam mendukung kegiatan pariwisata DIY. Perencanaan yang ada juga kurang berhasil dalam mengantisipasi perubahan global yang bersifat cepat dan dinamis. Meskipun mayoritas wisatawan ke DIY adalah turis domestik, turunnya jumlah wisman secara drastis akibat suatu kejadian yang kurang terantisipasi, dapat mengganggu kelangsungan kesempatan kerja di banyak sektor yang terkait dengan kegiatan pariwisata. Untuk mengatasinya perlu memperkuat peran pemerintah dalam mengantisipasi gangguan keamanan yang dapat menurunkan citra Indonesia di pasar global. Demikian pula peran KBRI di luar negeri perlu ditingkatkan terutama di bidang promosi dan *public relation* sehingga mampu mengantisipasi isu negatif yang merugikan dunia pariwisata Indonesia.

Keberhasilan industri pariwisata daerah dalam memperluas kesempatan kerja sangat tergantung dari posisi daya saing daerah tersebut, baik secara domestik maupun internasional. Hal ini berarti setiap wilayah yang memastikan industri pariwisata sebagai sektor unggulan, harus mempunyai kemampuan daya saing dan keunikan karakteristik dalam perekonomian (Sugiantoro, 2001). Untuk meningkatkan daya saing industri pariwisata daerah, banyak faktor yang harus dipertimbangkan sehingga dapat menarik investor ke wilayah tersebut. Selama ini faktor pendukung untuk menarik investasi masih dalam kewenangan dan kebijakan pemerintah pusat, sehingga peningkatan daya saing regional perlu didukung oleh iklim yang kondusif di tingkat nasional. Kerentanan dunia pariwisata juga dipengaruhi oleh berbagai gejolak sosial politik nasional, yang dalam beberapa tahun terakhir berpengaruh terhadap menurunnya posisi daya saing pariwisata nasional dan regional. Kelemahan pemerintah dalam mengantisipasi dan mengatasi permasalahan keamanan nasional maupun daerah, akan menyulitkan daerah dalam meningkatkan posisi daya saingnya, meskipun banyak upaya telah dilakukan untuk mengangkat citra pariwisata daerah (misalnya menciptakan *brand image*, menggalang hubungan bilateral, dan promosi).

Ketimpangan pembangunan antardaerah di DIY, terutama antara wilayah Tengah (Sleman, Kota Yogya dan Bantul) dan wilayah lainnya (Kulon Progo dan Gunung Kidul) tampaknya sejalan dengan perbedaan perkembangan pariwisata di wilayah-wilayah tersebut. Ketimpangan tersebut dipengaruhi adanya perbedaan potensi dan fasilitas pendukung yang dimiliki masing-masing wilayah DIY. Untuk mengurangi ketimpangan wilayah, diperlukan kesiapan masing-masing Dati II dalam melaksanakan OTDA, serta bantuan yang optimal bagi wilayah yang tertinggal. Untuk membantu mempercepat pembangunan wilayah yang tertinggal, diperlukan peran strategis Dinas Pariwisata Tingkat I, terutama dengan meningkatkan

promosi pariwisata melalui penyelenggaraan atau memfasilitasi pameran industri atau unggulan wilayah lain, baik di dalam maupun di luar negeri. Pemerintah provinsi juga berperan dalam mengkoordinasi dan mensinergikan kegiatan pariwisata daerah secara terpadu sehingga dapat menjadi kegiatan pariwisata yang komplementer. Namun sesuai dengan ketentuan OTDA, pemerintah provinsi memiliki keterbatasan baik secara administratif maupun pendanaan. Padahal keseimbangan kegiatan industri pariwisata diperlukan untuk wilayah DIY, agar penciptaan kesempatan kerja dapat lebih merata ke daerah, sekaligus mengurangi kekumuhan kota/wilayah yang menjadi konsentrasi wisatawan selama ini.

Strategi pengembangan industri pariwisata mencakup berbagai komponen yang saling berkaitan, namun tetap dalam wewenang masing-masing sektor. Dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, diperlukan koordinasi untuk mensinergikan komponen-komponen tersebut menjadi suatu kegiatan yang terpadu dalam mendukung perkembangan pariwisata DIY. Upaya dalam meningkatkan koordinasi sektoral dan wilayah pembangunan DIY, pemerintah daerah menghadapi berbagai hambatan baik birokrasi, kesiapan SDM, kultural maupun ketersediaan dana. Berdasarkan RIPPDIY, salah satu parameter keberhasilan kegiatan pariwisata adalah terciptanya lapangan kerja dan usaha. Parameter ini hanya mungkin berdaya guna apabila dilengkapi dengan konsep dan cara untuk mengetahui sektor-sektor yang tercakup dalam kegiatan pariwisata, baik langsung maupun tidak. Selama ini pengaruh kegiatan pariwisata terhadap peningkatan kesempatan kerja dan usaha hanya dapat diperkirakan berdasarkan penyerapan tenaga kerja di sektor yang berkaitan langsung dengan pariwisata, seperti perhotelan, pemandu wisata, dan jasa yang langsung melayani wisatawan. Dalam kenyataannya banyak kegiatan sektoral yang secara tidak langsung terkait dengan kegiatan pariwisata, namun sulit dipisahkan dari pengaruh kegiatan non-

pariwisata. Untuk mengetahui pengaruh pariwisata dalam penciptaan lapangan kerja dan usaha pada semua sektor, diperlukan konsep atau cara untuk memisahkannya dari faktor-faktor lain. Akibatnya keberhasilan pariwisata dalam menciptakan lapangan kerja dan usaha selama ini, cenderung *under reporting*, karena berdasarkan perkiraan kasar dari sektor yang terkait langsung dan cenderung mengabaikan pengaruh dari sektor lainnya.

Kesempatan kerja dan usaha di DIY masih didominasi oleh sektor-sektor informal yang umumnya menjadi tumpuan ekonomi rakyat. Sektor ini berhasil menyerap banyak tenaga kerja, namun sumbangan sektor tersebut dalam pertumbuhan ekonomi sangat terbatas. Akibatnya penciptaan lapangan kerja terutama di sektor formal masih terbatas sehingga pengangguran didominasi angkatan kerja yang relatif terdidik. Adanya pergeseran pola pemerintahan baik di tingkat lokal (diefektifikannya OTDA) maupun tingkat nasional (dari sentralistik-eksploitatif ke desentralistik-partisipatif), membutuhkan tenaga-tenaga terdidik, terampil, dan berdedikasi untuk mengisi peluang kerja sesuai kebutuhan. Permasalahannya adalah apakah ada kesesuaian pencari kerja dengan peluang yang tersedia? Dengan kata lain apakah SDM yang relatif terdidik, selain “siapa kerja” juga “siapa pakai”?

Tantangan Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja

Menurut Porter dalam buku *The Competitive Advantage of Nations*, keunggulan kompetitif ditentukan oleh produktivitas sumber daya manusia (SDM) suatu bangsa (dalam Sugiantoro, 2001). Dengan demikian, tersedianya SDM yang berkualitas baik dari segi ilmu pengetahuan, keterampilan maupun etos kerja, sangat penting dalam meningkatkan daya saing produk jasa pariwisata. Di era globalisasi peran keunggulan komparatif yang hanya mengandalkan *input* (buruh murah, sumber

daya alam, dan modal), makin berkurang, dan bergeser pada peran keunggulan kompetitif yang lebih mencerminkan suatu pencapaian dalam efisiensi atau produktivitas tenaga kerja.

Faktor manusia mempunyai peran penting dalam menentukan daya saing pariwisata, baik sebagai pelaku wisata maupun sebagai pengambil manfaat dari kegiatan industri pariwisata di wilayahnya. Untuk mencapai posisi daya saing yang dibutuhkan bagi perkembangan pariwisata, diperlukan kemauan politik dan sekaligus kemauan aksi, yaitu bekerja keras sesuai dengan visi dan misi yang ditentukan. Untuk itu, dibutuhkan birokrasi dan politisi yang siap melahirkan kebijakan yang kondusif bagi peningkatan daya saing regional dan global. Demikian pula untuk pelaksanaan kegiatan, diperlukan tenaga kerja yang terampil dan siap kerja di bidangnya.

Dilihat dari potensi SDM, Yogyakarta dianggap memiliki kelebihan dalam ketersediaan SDM yang berkualitas, dibandingkan daerah lain di Indonesia. Hal ini dapat dijadikan modal yang baik dalam mengelola potensi besar pariwisata di berbagai wilayah DIY. Namun dalam realitas kegiatan pariwisata DIY selama ini, para pelaku pariwisata baik dari kalangan birokrasi maupun swasta, didukung oleh SDM yang kebanyakan bukan dari latar belakang pendidikan kepariwisataan. Untuk meningkatkan profesionalisme diperlukan tenaga-tenaga kerja yang terdidik dan terlatih serta mempunyai etos kerja di bidangnya. Mengingat jumlah lulusan kejuruan terkait pariwisata cukup tersedia di DIY, ketidaksesuaian pendidikan dengan dunia pekerjaan perlu dicermati, apakah karena masalah sistem pendidikan yang tidak sesuai dengan kebutuhan atau faktor lainnya. Demikian pula banyak pelaku dari birokrasi yang kurang memiliki kemauan politik dan komitmen yang jelas untuk perkembangan pariwisata, baik karena tidak kontinu menduduki posisi tersebut (akibat mutasi atau promosi jabatan) ataupun aspek politis (karena dukungan partai politik tertentu).

Berbagai perubahan sosial politik yang terjadi, baik internal maupun eksternal, memaksa pemerintah daerah mentransformasikan diri dari *bureaucratic-monopolistic government* menjadi *entrepreneurial competitive government* (Sugiantoro, 2001: xvi). Oleh karena itu, diperlukan tenaga kerja birokrasi dengan kualifikasi yang cocok dengan kebutuhan seperti jeli melihat peluang, berpikir keras, dan dapat mendorong terjadinya kompetisi dalam pelayanan publik. Dalam realitas, diefektifkannya OTDA telah menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan status dan jabatan, sehingga banyak pejabat baru yang kurang menguasai permasalahan yang berkaitan dengan kebijakan pariwisata. Akibatnya banyak kegiatan pariwisata menjadi tidak efisien atau kurang terjadi inovasi. Rendahnya kinerja birokrasi pelaku pariwisata juga dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan yang umumnya tidak terkait dengan bidang kepariwisataan (Bappeda DIY, draft).

Salah satu kelemahan pariwisata DIY adalah rendahnya kemampuan pelaku pariwisata dalam menahan wisman untuk tinggal lebih lama di DIY. Hal ini dipengaruhi oleh kemampuan pelaku dalam menentukan paket wisata yang masih tergantung pada daerah wisata Bali atau Jakarta. Kompleksnya permasalahan dalam pengembangan pariwisata, diperlukan pemikir-pemikir untuk menyusun perencanaan yang lebih cerdas di bidang pariwisata. Kerja sama yang lebih optimal diperlukan antara birokrasi terkait dengan kelembagaan pemikir pariwisata (seperti Puspar UGM dan STUPA), terutama dalam melakukan terobosan dan inovasi yang dapat meningkatkan daya saing DIY.

6. PENUTUP

Prospek perkembangan pariwisata DIY, dipengaruhi oleh berbagai faktor baik internal maupun eksternal. Secara internal, dengan menjadikan turisme sebagai komoditas unggulan dalam pembangunan wilayah DIY, maka pariwisata DIY diharapkan mampu

menjadi lokomotif dari perkembangan sektor lainnya, termasuk perdagangan dan investasi. DIY memiliki modal yang cukup memadai untuk pengembangan pariwisata, baik objek wisata budaya, SDM dengan berbagai kualifikasi pendidikan, serta sarana pendukung yang memadai untuk perluasan pasar baik regional maupun internasional. Dengan kekayaan yang dimiliki di bidang seni budaya, aneka macam industri kerajinan dan dukungan dari para pemikir pariwisata dan akademisi terkait, DIY siap melangkah untuk memiliki produk unggulan yang berdaya saing baik di tingkat lokal, regional, maupun global. Faktor internal lainnya yang cukup strategis adalah peran Sri Sultan selaku Kepala Daerah Tingkat I yang mempunyai komitmen tinggi terhadap perkembangan pariwisata terutama yang berbasis komunitas. Peran sentral sebagai raja yang menguasai keraton dengan keunikan budaya Jawa, sangat penting artinya dalam mempertahankan salah satu keunggulan pariwisata DIY, yaitu wisata budaya. Berbagai faktor positif tersebut merupakan modal yang sangat berharga untuk menghadapi berbagai tantangan internal, seperti kelemahan birokrasi, rendahnya kesadaran masyarakat, serta keamanan lingkungan.

Sebagai penutup tulisan, kita perlu menyadari kompleksnya permasalahan ketenagakerjaan terkait dengan pengembangan industri jasa pariwisata, baik dalam konsep pengukuran maupun implementasinya dalam penyediaan kesempatan kerja dan peningkatan kualitas SDM sesuai dengan kebutuhan. Dunia pariwisata juga sangat rentan dari berbagai perubahan dan gejolak baik di dalam maupun luar negeri. Untuk tetap *survive* dan kompetitif dalam kancah persaingan global, maka pengembangan industri pariwisata DIY tidak mungkin lepas dari situasi dan kondisi pariwisata nasional. Demikian pula prospek pengembangan pariwisata akan sangat tergantung pada keseriusan birokrasi dalam pengelolaan pariwisata, baik dalam menentukan kebijakan, pelaksanaan, maupun pengawasannya. Demikian pula dukungan

semua pihak, baik swasta maupun masyarakat luas, terutama dalam menghadapi perubahan-perubahan global yang cepat dan dinamis. Apabila DIY berhasil mempertahankan kondisi aman dan nyaman serta iklim yang kondusif untuk investasi, maka pariwisata DIY yang berbasis komunitas, dapat memanfaatkan peluang globalisasi ekonomi seoptimal mungkin, terutama dalam memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan kualitas SDM. Demikian juga pengembangan pariwisata DIY yang berbasis komunitas diharapkan mampu meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan masyarakat. Peran pemerintah pusat sangat diperlukan dalam meningkatkan daya saing pariwisata serta mengurangi resiko untuk berinvestasi di Indonesia. Sedangkan untuk mengembalikan citra pariwisata Indonesia, perlu upaya serius dan proaktif dari pemerintah pusat dalam menanggulangi berbagai permasalahan yang telah menghancurkan *image* Indonesia di pasar global.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Taufik dkk. 2002. *Pariwisata Etnik/ Budaya dan Identitas Komunitas Lokal di Serawak Malaysia Timur*. Jakarta, Seri Penelitian PSDR-LIPI, NO 01.
- Artha, A. Tuti. 2000. *Yogyakarta Tempo Dulu, Sepanjang Catatan Pariwisata*. Yogyakarta: Bigraf Pub.
- BAPPEDA DIY. 2005. *Propeda, DIY Tahun 2001-2005*. Yogyakarta: BAPPEDA, DIY.
- Biro Pusat Statistik DIY. 2001. *Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Angka*. Yogyakarta: BPS, DIY.
- _____. 2000. *Produk Domestik Regional Bruto Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2000*. Yogyakarta: BPS.
- Dinas Pariwisata DIY dan PUSPAR UGM. 1999. *Laporan Ringkas: Kaji Ulang RIPP, DIY*. Yogyakarta: DinPar DIY dan PUSPAR UGM.

Dinas Pariwisata Kodya Dati II Yogyakarta.
2000. *RIPPD Kodya Tingkat II Yogyakarta*. Yogyakarta: DinPar Kodya Yogyakarta.

Republik Indonesia, 2000. *PROPENAS*. Jakarta: Republik Indonesia.

Sugiantoro, V. Ronny. 2000. *Pariwisata: Antara Obsesi dan Realita*. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa.

_____. 2001. *Tourisme, Trade, Investment: Yogya dalam Bingkai Otonomi*. Yogyakarta: Bigraf Pub.

Tahajudin, Ujud dan Hari Susanto. 1996. *Aspek Sosial Budaya Industri Pariwisata: Hubungan Timbal Balik antara Industri Pariwisata dan Aspek Sosial Budaya di Daerah Tujuan Wisata*. Jakarta: PMB-LIPI.

Thoha, Mahmud (Ed.). 2001. *Globalisasi, Krisis Ekonomi dan Kebangkitan Ekonomi Kerakyatan*. Jakarta: PEP-LIPI.



1. ...
2. ...
3. ...
4. ...
5. ...
6. ...
7. ...
8. ...
9. ...
10. ...

1. ...
2. ...
3. ...
4. ...
5. ...
6. ...
7. ...
8. ...
9. ...
10. ...

